

SEPAK TERJANG BAGUS RANGIN DALAM SURAT DIPATI NATADIREJA KEPADA DAENDELS (1808)

Titin Nurhayati Ma'mun^{1*}; Hazmirullah²

¹Departemen Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

²Peneliti mandiri

*Korespondensi: titin.mamun@unpad.ac.id

ABSTRACT

In this article, we discuss a letter from a local official, named Raden Dipati Natadireja, to Governor-General Franco-Dutch Herman Willem Daendels (1808-1811). The letter written on 5 Jumadil akhir year of Dal 1223 AJ (July 25th, 1808) is a collection of the National Archives of the Republic of Indonesia and is coded ID-ANRI K66a, File 3569, Folio 39-42. Through the letter, Natadireja reported that many officials in Cirebon, especially low-ranking officials, joined the revolters. He also reported that the revolts were led by three respected figures, namely Kulur, Rangin, and Draham. In this research, the manuscript firstly was studied by using the philology theory that contain the method of manuscript study (codicology) and the method of text study (textology). Furthermore, the manuscript content was dialogued to the historical fact in the Cirebon Sultanate so that we obtained a complete understanding about context of writing the manuscript. The result shows that the wave of revolt had occurred since at least 1806 as the people of Cirebon could no longer stand the tyrannical treatment of colonial administration. On the other hand, the Chinese people actually get special treatment, especially in terms of land management.

Keywords: *Manuscript; Letter of Raden Dipati Natadireja; Cirebon; Daendels.*

ABSTRAK

Di dalam artikel ini, penulis mendiskusikan surat dari Raden Dipati Natadireja (seorang pejabat pribumi) kepada Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). Surat yang ditulis pada tanggal 5 Jumadil akhir Tahun Dal 1223 Jawa (25 Juli 1808) itu merupakan koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia dan diberi kode ID-ANRI K66a, File 3569, Folio 39-42. Melalui surat itu, Natadireja melaporkan tentang bahwa banyak pejabat di Cirebon, terutama pejabat rendah, justru memilih bergabung dengan kaum pemberontak. Ia pun melaporkan bahwa pemberontakan itu dipimpin oleh tiga tokoh yang sangat disegani, yakni Kulur, Rangin, dan Draham. Naskah tersebut terlebih dahulu dikaji menggunakan teori filologi yang di dalamnya terdapat metode kajian naskah (kodikologi) dan metode kajian teks (tekstologi). Selanjutnya, kandungan naskah didialogkan dengan fakta sejarah di Kesultanan Cirebon sehingga diperoleh pemahaman utuh mengenai konteks kehadiran naskah surat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelombang pemberontakan itu telah terjadi setidaknya sejak tahun 1806 karena rakyat Cirebon sudah tidak tahan menerima perlakuan lalim. Padahal, di lain sisi, orang-orang Cina justru beroleh perlakuan istimewa, terutama dalam hal pengelolaan lahan.

Kata Kunci: *Manuskrip; Surat Raden Dipati Natadirejo; Cirebon; Daendels.*

1. PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah Kesultanan Cirebon sejak abad ke-15 penuh dengan dinamika, dari kerajaan yang mandiri sampai Cirebon menjadi taklukan (*vasal*) Kesultanan Mataram pada pertengahan abad ke-17. Saat menjadi *vasal* Mataram itulah, tepatnya pada tahun 1662, Panembahan Ratu II¹ membagi wilayah kesultanan untuk ketiga putranya, yakni Martawijaya, Kartawijaya, dan Wangsakerta. Pada tahun 1677, Kesultanan Cirebon berpindah tangan menjadi wilayah taklukan Kesultanan Banten. Saat itu, ketiga sultan di Cirebon beroleh gelar; Martawijaya mendapat gelar Sultan Syamsuddin (Sultan Sepuh), Kartawijaya menjadi Sultan Kamaruddin (Badrudin; Sultan Anom), dan Wangsakerta menjadi Panembahan Cirebon (Atja 1988, 20).

¹ Setelah meninggal dunia, masyhur sebagai Panembahan Girilaya, merujuk kepada lokasi pemakamannya di Bukit Girilaya, dekat Bantul, Yogyakarta. Bahkan nama Panembahan Girilaya inilah yang justru populer di kalangan sejarawan (Sunardjo 1983, 128-129).

Empat tahun kemudian, Kesultanan Cirebon menjalin "persahabatan" dengan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), tepatnya pada 7 Januari 1681². Sejak itu, kongsi dagang Belanda tersebut turut mencampuri segala urusan di Kesultanan Cirebon, termasuk dalam hal penentuan pucuk pimpinan. Sejak memutuskan menjalin "persahabatan" dengan VOC, Kesultanan Cirebon justru dikenakan berbagai kewajiban. Para sultan wajib menyeter komoditas-komoditas tertentu kepada kompeni dengan harga yang telah ditetapkan secara eksklusif. Para sultan dan pengikutnya juga dilarang berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan orang asing, apalagi menjalin kerja sama perdagangan. Untuk memastikan itu berjalan efektif, kompeni menempatkan seorang residen, dibantu oleh garnisun yang terdiri atas 70 orang Eropa. Mereka ditempatkan di sebuah benteng kecil di Distrik Cirebon dan sebuah pos luar di Indramayu (Stockdale 2014, 232).

Dalam perjalanan sejarah Cirebon, salah satu "episode" yang menarik perhatian penulis adalah dekade terakhir abad ke-18 hingga pertengahan dekade kedua abad ke-19. Pada periode itu, banyak sekali peristiwa yang terjadi, mulai dari skala lokal hingga internasional. Salah satunya adalah peristiwa gejolak sosial yang berdurasi panjang di seantero tanah Cirebon yang pada akhirnya memunculkan banyak sekali tokoh rakyat, di antaranya Bagus Sidong, Bagus Suwasa, Bagus Rangin, Bagus Jabin, Bagus Serit, dan Nariyem.

Pada periode ini, telah terjalin komunikasi yang baik antara Kesultanan Cirebon dan pemerintah kolonial. Para penguasa lokal di Cirebon seringkali menyampaikan informasi melalui surat-surat ke Batavia, demikian pula sebaliknya. Apalagi, pada dekade pertama abad ke-19 Masehi itu, kegawatan di serata Cirebon sedang meningkat, seiring dengan munculnya pemberontakan rakyat. Salah satu informasi penting terkait dengan kondisi Cirebon pada masa itu termaktub di dalam sepucuk surat yang ditulis oleh salah seorang pejabat lokal di Cirebon pada bulan Juli 1808 dan ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Tokoh bernama Raden Dipati Natadireja itu melaporkan pemberontakan yang terjadi di wilayah Cirebon, termasuk para dalangnya. Penulis tertarik untuk membahas surat ini karena beberapa hal. Pertama, surat merupakan bukti akurat yang tentu saja penting dalam penulisan sejarah Indonesia. Kedua, surat tersebut ditulis dalam aksara tradisional (aksara Jawa) sehingga tak lagi bisa dibaca oleh sebagian pembaca masa kini. Oleh karena itu, penulis akan semaksimal mungkin untuk mengungkapkan kandungan surat tersebut sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas. Selain itu, penulis akan mendialogkan kandungan surat tersebut dengan arsip dan literatur sejarah yang saat ini sudah beredar di tengah-tengah masyarakat.

2. METODE

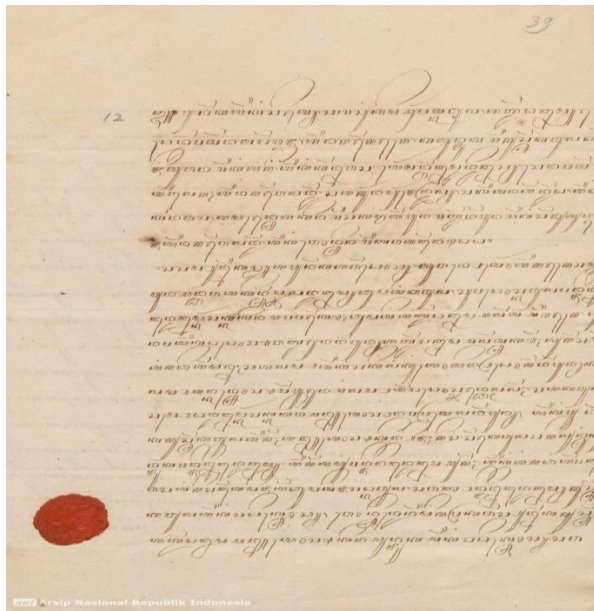
Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menggunakan metode penelitian filologi yang di dalamnya terdapat metode kajian naskah (kodikologi) dan metode kajian teks (tekstologi). Kodikologi dimaksudkan untuk memperoleh lalu mendedahkan informasi ihwal seluk-beluk naskah, seperti aksara, bahasa, bahan, usia, tempat penulisan, penyalin, dan perkiraan penulis naskah (Baried *et al.* 1985, 55). Sementara dalam tekstologi, penulis memilih untuk menggunakan metode edisi standar/kritis, satu dari dua pilihan untuk penyajian naskah tunggal. Arkian, teks yang terdapat di dalam naskah tersebut didialogkan dengan sumber-sumber primer dan sekunder yang menjadi fakta sejarah Kesultanan Cirebon. Hal itu dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai latar belakang dan konteks penerbitan naskah tersebut.

² Dari pihak VOC, persetujuan itu ditandatangani oleh Jacob van Dyck dan Jochem Michielse. Sementara dari pihak Cirebon, penandatanganan persetujuan itu adalah Sultan Sepuh, Sultan Anom, Panembahan Cirebon dan enam dari jaksa *kapitu/pepitu* (Raksanagara, Anggadireksa, Purbanegara, Anggadiprama, Anggaraksa, Nayapati; seorang jaksa yang tak hadir adalah Singanegara).

3. DESKRIPSI NASKAH

Naskah surat ini merupakan koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia dan diberi kode ID-ANRI K66a, File 3569, Folio 39-42³. Oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, naskah ini dimasukkan ke dalam "bundel" yang diberi judul "*Arsip Gubernur-Jenderal dan Dewan Hindia (Pemerintah Agung) pada VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) dan para pejabat penerusnya, 1612-1812*". "Bundel" tersebut memiliki volume 500 meter linier, berbahan kertas, dengan nomor inventaris 1 hingga 4.631.

Teks ditulis di atas dua lembar kertas Eropa (kemungkinan besar 'J Wise & Patch')⁴ berukuran folio, warna kekuning-kuningan. Naskah dalam kondisi baik dan seluruh teks masih dapat terbaca. Sebenarnya, teks ditulis secara bolak-balik (*recto-verso*). Akan tetapi, arsiparis ANRI membubuhkan angka Arab di setiap halaman dengan menggunakan pensil, yakni 39 hingga 42. Sistem penomoran inilah yang jadi patokan penulis dalam mendeskripsikan naskah. Di halaman ganjil (39 dan 41), nomor halaman diletakkan di sudut kanan (*right-hand*) atas. Sementara di halaman genap (40 dan 42), nomor halaman diletakkan di sudut kiri (*left-hand*) atas. Meskipun demikian, di halaman 39, arsiparis ANRI membubuhkan angka Arab "12" di samping kiri baris pertama teks⁵.



Gambar 1. Halaman pertama naskah surat dari Raden Dipati Natadireja kepada Daendels (Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Halaman 39 memuat 18 baris teks, halaman 40 dan 41 masing-masing memuat 17 baris teks, sedangkan halaman 42 memuat 13 baris teks. Dengan demikian, total terdapat 65 baris teks di dalam naskah tersebut. Teks ditulis dengan menggunakan tinta hitam. Namun, tingkat kehitaman tinta di bagian kolofon berbeda dengan bagian pembuka dan tubuh surat. Goresan tinta di bagian itu pun lebih tipis dibandingkan dengan bagian-bagian lain. Sepertinya, penulis surat menggunakan jenis pena yang berbeda saat menulis kolofon.

Di sudut kiri (*left-hand*) bawah halaman 39, terdapat cap berbentuk bulat yang menggunakan tinta warna merah. Sisi atas lingkaran cap sejajar dengan ruang di antara baris 16 dan 17 teks. Sementara sisi atas lingkaran cap sejajar dengan teks baris ke-18. Cap tersebut sebenarnya memuat tulisan, tetapi tak bisa teridentifikasi.

³ Penulis memperoleh naskah tersebut secara daring (*online*), melalui situs web <https://sejarah-nusantara.anri.go.id>. ANRI juga menyimpan naskah yang berisi teks terjemahan surat tersebut dan diberi kode Folio 43-46. Naskah terjemahan itu tidak dideskripsikan, tetapi isinya akan dijadikan "saksi" dalam pengkajian.

⁴ Merujuk kepada kesamaan ciri kertas dalam beberapa surat dari Sultan Sepuh Cirebon. Keterangan 'J Wise & Patch' dibubuhkan terhadap surat balasan Sultan Sepuh kepada Thomas Stamford Raffles pada 26 April 1811 (Mss. Eur. D742/1 f.49 dan Mss. Eur. D742/1 f.49ab; koleksi British Library).

⁵ Maksud pembubuhan angka Arab "12" itu tidak teridentifikasi.

Merujuk kepada ketentuan di dalam Kitab Terasul, posisi cap menunjukkan bahwa pengirim surat (Raden Dipati Natadireja) memosisikan status sosialnya jauh berada di bawah penerima surat (Herman Willem Daendels). Di dalam Kitab Terasul, berlaku aturan, cap yang diposisikan di bagian kiri naskah memiliki makna bahwa surat itu berasal dari "orang biasa". Semakin ke bawah posisi cap, semakin rendah pula status pengirim surat dibandingkan dengan penerima surat⁶.

Ketika membaca kalimat awal teks surat, segera diketahui bahwa surat tersebut dikirimkan oleh Raden Dipati Natadireja (yang bertugas) di wilayah Kesultanan Cirebon. Ia menunjukan surat itu kepada Herman Willem Daendels, "panglima perang Negeri Belanda, gubernur jenderal Hindia-Belanda, yang diberi kuasa untuk memerintah seluruh negeri bawah angin atas nama raja Belanda"⁷. Merujuk kepada kolofon (h. 42), Dipati Natadireja menyatakan bahwa surat itu ditulis pada tanggal 5 Jumadilakhir Tahun Dal 1223 Hijriah. Arsiparis ANRI mengonversi kolofon itu menjadi 25 Juli 1808⁸.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Edisi Teks dan Terjemahan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami teks surat, penulis menyajikan edisi teks dan terjemahan secara berdampingan. Di dalam edisi teks, penulis juga membubuhkan aparat kritik jika diperlukan, terutama terhadap suku kata, kata, dan frasa yang dianggap keliru. Aparat itu berupa () 'tanda kurung lengkung dengan teks di dalamnya' disebut *addenda* dan [] 'tanda kurung siku dengan teks di dalamnya' disebut *disdenda*. Tanda *addenda* berarti 'huruf, suku kata, kata, frasa, atau kalimat ditambahkan oleh penulis, tetapi sebaiknya dibaca'. Sementara tanda *disdenda* berarti 'huruf, suku kata, kata, frasa, atau kalimat sebaiknya tidak perlu dibaca'. Penulis juga membubuhkan < > 'tanda kurung lancip dengan teks di dalamnya' sebagai penanda halaman naskah.

Di dalam edisi teks, penulis juga membubuhkan puntuasi, tanda yang sebenarnya tidak terdapat di dalam teks naskah objek penelitian. Pembubuhan tanda baca dilakukan berdasarkan interpretasi terhadap isi teks tanpa sebarang indikasi formal dari struktur kalimat. Sementara dalam terjemahan, penulis menggunakan terjemahan setengah bebas agar kandungan teks dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Berikut penulis sajikan edisi teks dan terjemahan surat tersebut:

Edisi Teks	Terjemahan
<p><i>Punika ingkang sêrat saha sungkêm hurmat kawula, abdi dhalem Radhén Dipati Natadireja ing Nagari Garagé, kaunjuk ing gusti kawula Kangjêng Tuan ingkang agêng, ingkang kinawasa, Hérman Willem Daendêls, sénapati ing alagah ing Nagari Walandi saha Gurnadhur Jéndral saking tanah Indiya, ingkang kinawasa amaréntahakên ing sakathahipun abdinipun ingkang sinuhun raja ing Nagari Walandi ingkang wontên ing bawah angin sadhaya.</i></p>	<p>Inilah surat (yang dikirim) serta sembah sujud dan hormat saya, abdi dalem Raden Dipati Natadireja (yang bertugas) di Negeri Cirebon, kusampaikan kepada tuanku Kanjeng Tuan yang mulia, yang berkuasa, Herman Willem Daendels, panglima perang Negeri Belanda serta Gubernur Jenderal Hindia yang berkuasa sepenuhnya (untuk) memerintah negeri-negeri di bawah angin atas nama raja Belanda.</p>

⁶ Informasi lebih detail ihwal cap (stempel) dalam surat, posisi, dan maknanya, lihat Gallop (1994, 44-45).

⁷ "sénapati ing alagah ing Nagari Walandi, saha Gurnadhur Jéndral saking tanah Indiya, ingkang kinawasa amaréntahakên ing sakathahipun abdinipun ingkang sinuhun raja ing Nagari Walandi, ingkang wontên ing bawah angin sadhaya".

⁸ Berdasarkan tabel konversi, tahun 1223 Hijriah memang berselisih 585 tahun dengan Masehi. Dengan demikian, tahun 1223 Hijriah memang bertepatan dengan tahun 1808 Masehi (Stibbe dan Spat 1927, 76).

Sasampuning kadhya apunika, awiyos tuwané pator ing Garagé sampun andhawahakên timbalan dalem dhumatêng kawula supadhos kawula panjênengan dalem karsakakên apapariksa dhumatêng abdi dhalem alit ing Garagé. Punapa ingkang dhadhos sawab darunanipun abdi dhalem alit taksih ugi sami anggadhêhi manah saha lampah ingkang sakêlangkung botên prayoginipun kalampahan kantos sami purun anglampahi dhadhos barandhal malih. Saha kawula sampéyan dalem karsakakên anyaosan papratélanipun ingkang punika gusti kawula inggih anyaosakên pêjah gêsang, sira kawula sagêlung kunjuk panjênengan dalem, inggih amung panjênengan dalem ugi ingkang anggadhahi pangawasa anggêsangi amêjahi dhumatêng jasadh kawula, sawab panjênengan dalem gusti kawula ingkang sayêktos, wontên dhéning mênggah prakawis punika gusti abdi dhalem anyaosakên unjuk ingkang sayêktos, sawab <folio 39> sadéréngipun wontên bawa dhalem punika, kawula sampun apapariksa, saha angyêktosakên dhumatêng abdi dhalem para kapala, tuwin titiyang alit, inggih botên wontên ingkang katingalan, ing maripat kawula, punapa dhéning ingkang sami agadhah, aturan saking dhéning wontên ingkang andhadhosakên, sawab punapa-punapa, mênggah ing abot kapratanipun, inggih botên, mala saking pamireng saapaningal kawula ingkang sampun kawula yêktosakên ingkang têmên, sami anggadhahi wiraosé aca, saha énthéng, punapa dhéné katingalan ing tingka solahipun inggih sami tumêmên, girang majéng ing sumadhayanipun padhamêlan, mila dhadhos ing mangké kawula botên wagêdh angraosakên mênggah abdi dhalem alit kantos kalampahan samipurun anggadhah ing manah saha lelampahan, ingkang sakêlangkung

Selanjutnya (saya) beritahukan, Petor Cirebon menyampaikan informasi resmi (bahwa) saya (dan) Anda sebaiknya memeriksa (para) *abdi dalem alit* di Cirebon. (Hal itu harus dilakukan) lantaran para *abdi dalem alit* masih juga tega berbuat tidak pantas (yakni) berani ikut-ikutan menjadi pengacau (berandal), (di mana) saya (dan) Anda akan memberi penjelasan. Terkait dengan hal itu, Tuan, saya menyerahkan mati hidup diri saya seutuhnya kepada Anda. (Lagi pula,) memang, Anda memiliki kekuasaan untuk menghidupkan (atau) mematikan jasad saya karena Anda (merupakan) tuan saya yang sebenar-benarnya. (Terkait dengan) perkara tersebut, Tuan, saya (hendak) menyampaikan kenyataan yang sebenar-benarnya karena sebelumnya saya telah memeriksa sekaligus membuktikan (dugaan yang ditujukan) terhadap para *kapala* serta orang-orang kecil (*titiyang alit*; para bawahan), sama sekali tidak kelihatan, dalam *maripat* saya, dari apa yang sama-sama dimiliki, aturan yang diberlakukan, sebab apa-apa, sama sekali tidak memberatkan. Berdasarkan pendengaran dan penglihatan saya yang telah dibuktikan secara sungguh-sungguh, (bahwa saat ini mereka) merasa senang, mudah. Hal itu terlihat dalam perilaku yang secara nyata (mereka tunjukkan), (yakni) bergembira hati dalam melakukan semua pekerjaan. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak merasakan bahwa para *abdi dalem alit* telah melakukan perbuatan yang tidak pantas tersebut. Soalnya, itu tadi, (saya) sama sekali tidak pernah melihat dan mendengar sedikit pun tentang keberatan (keluhan) mereka. (Sebaliknya, mereka) sangat senang dalam melakukan pekerjaan.

*botên prayoginipun punika, réhing
botên wontên ingkang katingalan tuwin
ingkang kawula pireng mênggah
ingkang dhadhos sawab dharunanipun
ing bot kapratanipun kédhik-kédhik,
inggihi ugi sami suka girang, saha
kajêng majêng ing padhamêlan.*

*Wontên dhéning mênggah pandugi
pangraos sing manah kawula ingkang
sayêktos, ingkang mawi dhadhos margi
sawab dharunanipun <folio 40> abdi-
abdi dhalem alit sami kalampahan
purun adhamêl ingkang sakêlangkung
botên prayogi punika, inggihi namung
awit saking asangêt bodhonipun abdi-
abdi dhalem alit, mangka kangujuk
kaajak dhatêng kapala titiga kang
sakêlangkung dhéning awonipun
punika, kadhosta pun Kulur, pun
Rangin, saha pun Draham. Dhadhos
saking sami asangêt kabodhohanipun
abdi-abdi dhalem alit, mila
kalampahan sami andérék ing
pambujukipun wau kapala titiga
ingkang sakêlangkung dhéning
awoning punika,, saha pangraos
kawula, bili wau kapala titiga ingkang
sakêlangkung dhéning awonipun
dhéréng kacêpêng, amasthi dhéréng
wagêdh saé karta pisan abdi-abdi
dhalem alit, sawab panitikan kawula
saking asangêt bodhonipun abdi-abdi
dhalem alit, inggihi taksih ugi sami
amireng kagimirena ing pambujukipun
wau kapala titiga kang sakêlangkung
dhéning awonipun punika,, kali
dhéning tuwané pator acacriyos
dhatêng kawula, aprakawis dhéning
abdi dhalem pun Dêmang
Suraprasandhah ingkang kasuhun ing
panjênêngan dalem supadhos kênging
akaranté.*

*Inkang punika gusti mênggah
sapaningal saha pamireng kawula,
inggihi sampun dumugi ing
kahukumanipun sapunika, <folio 41>
sawab botên sapisan kaping kali*

(Meskipun demikian, dalam kesempatan ini), sesungguhnya, saya menyimpan kekhawatiran bahwa para *abdi alem alit* memang telah berani memperbuat sesuatu yang tidak pantas. Sebenarnya hal itu bermula dari kebodohan para *abdi dalem alit* sehingga terbujuk untuk mengikuti langkah *kapala titiga* yang sesungguhnya sangat buruk, seperti Kulur, Rangin, serta Draham. Dengan demikian, kebodohan itulah yang membuat para *abdi dalem alit* termakan bujuk rayu *kapala titiga* untuk melakukan perbuatan yang sangat buruk tersebut. Selanjutnya, kekhawatiran (perasaan) saya, selagi *kapala titiga* –yang sangat buruk itu-- belum tertangkap, pastilah tidak akan datang ketenteraman di dalam diri para *abdi dalem alit*. Soalnya, berdasarkan penyelidikan saya, lantaran kebodohan para *abdi dalem alit* itu, mereka masih berkemungkinan untuk termakan bujuk rayu *kapala titiga* yang berkelakuan buruk tersebut. Selain itu, Petor Cirebon juga mengungkapkan kepada saya tentang seorang *abdi dalem* yang bernama Demang Suraprasandhah yang diminta oleh Anda untuk mendapat hukuman (*akarante*).

Soal ini, berdasarkan penglihatan dan pendengaran saya, sebenarnya hukuman tersebut sudah diberlakukan. Soalnya, tak hanya sekali dua kali ia memperlihatkan pembangkangan (*cidhranipun*) serta tidak

kémawon énggénipun katingalan ing cidhranipun tuwin botên angéstockakên ing paréntah,, mamala kantos wau kapala ingkang sakêlangkung dhéning awonipun ingkang awasta pun Rangin, umpêt tan wontên ing dhusun bawa réréhanipun botên pisan wau abdi dhalem pun Suraprasandhah, yén angatingalena ing katêmenanipun amuri anyêpêng wau pun Rangin, tansah ugi katingalan énggénipun angubêng-ubêng ambrih ing bubaripun wau pun Rangin kimawon.

Inkang punika gusti, mênggah sakathah-kathahipun unjuk kawula ing panjênêngan dalem punika inggih têmên-têmên miyos saking tulus ikhlas sing manah, punapa barang kang sampun kawula tingali, saha ingkang kawula pireng punika sadhaya.

Kasêrat ing Nagari Garagé, kala tanggal ping gangsal, Sasi Jumadhilakir, Tahun Dal Hijrah, 1223.

mengindahkan perintah. Malah, salah seorang dari *kapala titiga* yang jahat itu, bernama Rangin, (pernah) bersembunyi di sebuah dusun yang berada di wilayah kekuasaan Demang Suraprasandhah. Jelas-jelas kedapatan bahwa ia tidak ingin menangkap Rangin. Bahkan, sebaliknya, ia justru menyuruh Rangin untuk segera melarikan diri.

Inilah, Gusti, hal-hal yang bisa saya sampaikan kepada Anda dengan sebenarnya. Saya pun melaporkan hal ini dengan tulus ikhlas dari hati, tentang segala hal yang saya lihat dan dengar.

Ditulis di Negeri Cirebon, pada tanggal 5 Jumadilakhir Tahun Dal 1223 Hijriah.

b) Kondisi Cirebon

Memasuki abad ke-19, kegawatan di Cirebon meningkat. Laskar bersenjata dari kalangan rakyat hadir di mana-mana sehingga menciptakan situasi tidak aman di wilayah itu. Kondisi itu dilatarbelakangi oleh kemarahan rakyat yang terus-menerus menerima tekanan dari para sultan (selaku kepanjangan tangan dari pemerintah kolonial). Apalagi, rakyat menyaksikan bahwa para sultan dan pejabat kolonial memperlakukan orang-orang Cina dengan sangat istimewa. Oleh karena itu, tak heran jika kemarahan rakyat ditujukan kepada para sultan, pejabat kolonial, dan orang-orang Cina (Boulger 1897, 114-115; Raffles 1814, 24; Lombard 2008, 80; Carey 2015, 45).

Kita harus terlebih dahulu mundur ke awal dekade kedua abad ke-18 Masehi, ketika VOC menemukan komoditas kopi. Produksi kopi di Nusantara dimulai sejak tahun 1711, ditandai oleh setoran perdana kopi dari Bupati Cianjur sebanyak 100 pon dan dihargai 50 gulden per pikul. Sejak itu, banyak pejabat pribumi –terutama di wilayah pedalaman Batavia dan dataran tinggi Priangan-- yang tertarik untuk membudidayakan kopi. Tak butuh waktu lama, kopi (bersama nila dan katun) menjadi produk ekspor unggulan VOC, menyingkirkan produk-produk unggulan sebelumnya, seperti sarang burung, kapulaga, dan malam. Memasuki dekade ketiga abad ke-18, produksi kopi dari wilayah Priangan terus meningkat. Pada tahun 1722, produksi kopi baru mencapai 6 ton. Empat tahun kemudian, wilayah Priangan sudah mampu memproduksi kopi sebanyak 2.145 ton. Dengan jumlah tersebut, VOC mampu menguasai 75% perdagangan kopi dunia. Setengah dari total produksi kopi dihasilkan dari wilayah Priangan barat, khususnya Cianjur (Bremen 2014, 61).

Pada masa-masa awal, budi daya kopi sangat menguntungkan VOC dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk para penguasa lokal dan kalangan petani. Belakangan, VOC mengubah kebijakan dan menempatkan kopi ke dalam sistem monopoli. Pada tahun 1723, misalnya, VOC akan menghukum siapa pun yang menjual kopi kepada pedagang swasta. Tiga

tahun kemudian, perusahaan dagang Hindia Timur itu secara semena-mena menurunkan harga pembelian kopi hingga 2,5 gulden per pikul dari semula 50 gulden per pikul. VOC beralasan, hal itu terpaksa dilakukan lantaran kekurangan uang tunai. Sebagai timbal balik, VOC membebaskan pajak sebesar 1/10 dari hasil panen (terutama padi) kepada para pemilik tanah. Padahal, sesungguhnya, pemangkasan harga itu ditujukan untuk semata-mata meningkatkan keuntungan (Breman 2014, 61-62).

Kebijakan semena-mena itu tentu saja menimbulkan perlawanan. Bahkan, Bupati Cianjur terbunuh, beberapa bulan setelah kebijakan penurunan drastis harga kopi tersebut. Di banyak tempat, para petani melancarkan protes dengan merusak tanaman kopi. Banyak pula petani, terutama di wilayah Keresidenan Cirebon, yang membiarkan perkebunan kopi mereka yang menjadi semak belukar. Selain itu, tak sedikit petani kopi yang beralih menanam komoditas baru (Knaap 1986, 45-46 dalam Breman 2014, 62-63). Tak heran jika kemudian terjadi kemunduran dalam produksi kopi. Menyikapi kondisi tersebut, pada tahun 1729, VOC --melalui Residen Cirebon-- mewajibkan semua keluarga yang bermukim di dataran tinggi Priangan untuk menanam sepuluh pohon kopi tambahan saban tahun. Pada tahun 1735, panen kopi meningkat tajam sehingga VOC menghentikan kebijakan penanaman pohon kopi tambahan tersebut serta memusnahkan pohon yang sudah tua.

Hingga akhir abad ke-18, jumlah setoran kopi dari kalangan petani untuk VOC terus meningkat. Akan tetapi, keuntungan dari hasil budi daya itu tidak sampai ke perusahaan, tetapi hanya dinikmati oleh kalangan pejabat di daerah. Menurut Boulger (1897, 114-115), pendapatan yang dihasilkan dari Cirebon selalu mengecewakan VOC. Padahal, para sultan Cirebon secara rutin menyetorkan kopi dan berbagai produk lain --yang tentu saja diperoleh dari rakyatnya-- kepada residen (bupati). Melalui sistem ini, residen Cirebon meraup penghasilan sebesar 80.000-100.000 dolar setiap tahun.

Praktik korupsi yang dilakukan residen diketahui oleh pejabat tinggi VOC. Oleh karena itu, pada tahun 1729, VOC mengangkat sejumlah pejabat pengawas berkebangsaan Eropa dengan pangkat *Gecommitterde tot de Saecken der Inlanderen* (Komitir untuk Urusan Pribumi) yang kelak disingkat menjadi *Commisaris* atau *Landcommisaris* (Breman 2014, 74). Sejak awal, para komisaris memiliki kewenangan yang sangat tinggi. Semua korespondensi antara petinggi VOC dengan para bupati harus melalui komisaris, demikian pula sebaliknya.

Para komisaris pun diberi kewenangan mengambil keputusan di wilayah tugasnya, tanpa perlu terlebih dahulu berkonsultasi --atau setidaknya-- melapor ke Batavia. Tak heran jika para komisaris disebut sebagai para "patih" gubernur jenderal. Terlebih, pada 1745, petinggi VOC mengeluarkan instruksi, para penguasa lokal (bupati dan pejabat di bawahnya) harus memberikan penghormatan militer ketika komisaris berkunjung. Belakangan, biaya yang dikeluarkan untuk penghormatan itu dibebankan kepada rakyat.

Kewenangan sangat besar itulah yang kemudian membuat para bupati berusaha sekuat tenaga "berkarib" dengan para komisaris. Para bupati tak segan-segan memberikan uang sogokan dalam jumlah besar agar posisinya tak diganggu. Praktik itu sudah dimulai menjelang pelantikan seseorang menjadi bupati. Uang sogokan ini sering disebut dengan istilah *uang bekti*.

Pada kenyataannya, sebagian besar calon bupati terlebih dahulu meminjam uang kepada orang-orang Cina untuk membayar *uang bekti* tersebut. Imbalannya, ketika sang bupati menjabat, orang-orang Cina itu diberikan keleluasaan "mengelola" lahan. Tak heran jika kemudian sebagian besar lahan di Cirebon "dimiliki" oleh orang-orang Cina. Kondisi itu terus berlangsung bahkan setelah VOC bangkrut. Inilah yang kemudian memicu pergerakan rakyat. Apalagi, dalam praktiknya, lahan yang diberikan kepada orang-orang Cina itu termasuk lahan-lahan milik pribadi rakyat. Inilah kondisi yang juga dialami oleh Bagus Raging (Breman 2014, 76; Raffles 1814, 128).

Kemarahan rakyat semakin memuncak seiring dengan perlakuan tidak adil terhadap Pangeran Raja Kanoman⁹. Meskipun berstatus sebagai putra mahkota, ia tak ditunjuk oleh sang ayah (Sultan Anom IV) sebagai sultan. Jabatan itu justru diserahkan kepada salah seorang putra dari selir atas persetujuan pemerintah kolonial. Bagi rakyat Cirebon, mereka tak bisa menerima berkah dari penguasa tidak sah. Tak heran jika kemudian Pangeran Raja Kanoman disangka sebagai aktor intelektual terjadinya pergerakan rakyat Cirebon tersebut. Ia pun diasingkan ke Batavia, lalu ke Ambon (Marihandono 2015, 2-3). Pemberontakan mencapai puncak pada 1806. Semua orang Cina diusir dari wilayah Cirebon atau dibunuh, sedangkan semua lahan dikembalikan kepada pemilik yang sah (Raffles 1814, 128-129).

Untuk meredam kemarahan rakyat, Pangeran Raja Kanoman dipulangkan dari pengasingan untuk diangkat menjadi Sultan Cirebon pada tahun 1807¹⁰. Meskipun demikian, pemberontakan rakyat tetap berlangsung ketika Herman Willem Daendels menjabat Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pada awal 1808. Lagi-lagi, Pangeran Raja Kanoman disangka sebagai aktor intelektual di balik pemberontakan rakyat. Atas dasar itulah, kelak, pada 1810, Daendels memecatnya (Lombard 2008, 80).

Di Jawa, tugas utama Daendels adalah memperkuat pertahanan, mengorganisasi ulang pasukan Belanda, dan menunggu momentum yang tepat untuk menyerbu India. Fokusnya memang di situ. Buktinya, hampir sepertiga bagian pasal (dari total 68 pasal, dalam tiga instruksi terpisah) yang diterima Daendels dari Raja Louis Bonaparte melulu berkaitan dengan urusan militer dan politik (Carey 2013, 7). Tugas lain yang juga penting adalah mereformasi pemerintahan bekas maskapai dagang Hindia Timur. Tujuan akhirnya, tentu saja, menyumbang pemasukan bagi kerajaan nun jauh di seberang pulau.

Namun, setiba di Jawa, Daendels segera dihadapkan kepada banyak kendala, utamanya adalah ketiadaan modal setelah VOC bangkrut. Celaknya lagi, sang “marsekal besi” tak lagi bisa menyelenggarakan perdagangan menguntungkan antarpulau akibat blokade Inggris. Akhirnya, oleh keadaan, ia dipaksa untuk menjalankan upaya sistematis untuk memanfaatkan daerah-daerah pedalaman Jawa (Lombard 2008a, 74).

Daendels menulis:

”Musuh menyerang dari arah pantai, dan para pangeran Jawa yang menyaksikan kelemahan kami, merasa telah tiba waktunya untuk mengalihkan loyalitasnya pada penguasa lama. Eksistensi kami di Jawa dalam bahaya. Sumber keuangan kami mulai menipis, sementara sektor perdagangan sedang macet, karena blokade pelabuhan milik kami. Inilah yang memutuskan harapan kami akan datangnya bantuan dari luar. Dalam keadaan kacau dan darurat seperti ini, saya memutuskan untuk bertindak di luar kebiasaan resmi, dan tidak mengindahkan aturan hukum yang ada, dengan tujuan menyelamatkan koloni yang telah diamanatkan kepada saya. Perintah yang saya terima ketika saya berangkat dari negeri Belanda membuat saya merasa berhak untuk melakukan tindakan tersebut” (Raffles 2014, xxviii).

Sebenarnya, Raja Louis Bonaparte mewanti-wanti Daendels agar jangan dulu membuat lalu menerapkan aturan baru –terutama dalam agenda reformasi mendasar-- di Jawa. Hal itu setidaknya sambil menanti situasi di Eropa kembali tenang. Namun, dasar “bengal”, Daendels tak menuruti perintah tersebut. Seperti diungkapkan di atas, *“Dalam keadaan kacau dan darurat seperti ini, saya memutuskan untuk bertindak di luar kebiasaan resmi, dan tidak mengindahkan aturan hukum yang ada”*. Ia beralasan bahwa semua itu dilakukan demi menyelamatkan koloni, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Daendels memang dimungkinkan untuk berbuat

⁹ Lubis (2015) mencatat, tokoh ini juga masyhur sebagai Pangeran Suriawijaya.

¹⁰ Kesultanan Kacirebonan dibekukan oleh VOC pada tahun 1768, setelah Sultan Abu Hayat yang lalim diasingkan ke Ambon.

demikian. Soalnya, ia dibekali kekuasaan khusus yang bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Dewan Hindia (Hall 1988, 445).

Tak heran, Daendels kemudian menaikkan pajak cukai menjadi 1/5 bagian dari total padi yang dipanen oleh para petani. Padahal, sebelumnya, pajak cukai yang diberlakukan kepada para petani hanya 1/20. Kenaikan pungutan yang berlipat-lipat itu --dan diberlakukan secara tak terduga itu—menyulut keresahan penduduk Cirebon.

Boulger (1897, 115) menyatakan bahwa hingga masa jabatan Daendels dan Jan Willem Janssens, rakyat Cirebon dikenakan delapan jenis pungutan. Kedelapan jenis pungutan itu adalah (1) kontingen, sebesar 15% dari total padi hasil panen, tetapi --pada kenyataannya—diterapkan secara seenaknya; (2) pajak per kepala (*poll-tax*) atau pajak atas keluarga, sebagian dipungut atas nama pemerintah, sebagian lagi atas nama kepala setempat; (3) pajak pasar atau tol, dipungut untuk setiap barang/komoditas yang dihasilkan dari pertanian, manufaktur, bahkan hasil kerajinan tangan; (4) pajak pemotongan sapi, yang memengaruhi harga makanan dan pembatasan terhadap upaya pembiakan hewan serbaguna tersebut; (5) pajak penginapan dan makanan bagi pengembara, pengangkutan, bagasi, dan penyimpanan semua barang; (6) kewajiban untuk membangun dan memperbaiki jembatan, jalan, dan bangunan publik di seantero negeri; (7) kewajiban untuk menanam dan menyeter --dalam jumlah yang memadai-- produk-produk untuk kepentingan ekspor, terutama kopi; dan (8) pajak persepuluhan, sebenarnya 1/20 dari total padi hasil panen, dialokasikan untuk tujuan keagamaan; pembayaran opsional, tetapi jarang sekali ditanggihkan.

Tak cukup sampai di situ, pada 2 Februari 1809, Daendels menerbitkan *Reglement op het beheer van de Cheribonsche-landen* 'Peraturan tentang Pengelolaan Wilayah Cirebon'¹¹. Dalam Ketentuan Umum (*Algemeene bepalingen*) disebutkan bahwa wilayah Cirebon dibagi menjadi dua prefektur. Pertama, *Sulthans-landen*, mencakup wilayah utara yang kini diduduki oleh Kesultanan Cirebon (termasuk Gebang). Kedua, *Cheribonsche Preanger-landen*, mencakup wilayah Kabupaten Limbangan, Sukapura, dan Tanah Galuh. Selanjutnya, Daendels menyerahkan pengelolaan tiap-tiap prefektur tersebut kepada seorang prefek (Chijs 1896, 474-475).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 1 Bagian Kedua, ketiga sultan di Cirebon dianggap dan diperlakukan sebagai pegawai Yang Mulia Raja Belanda. Sementara, secara struktural, mereka berada langsung di bawah prefek¹². Atja (1988, 39) menyebutkan bahwa ketiga sultan di Cirebon itu kemudian dianugerahi jabatan sebagai *hoofd-regent* atau wedana. Meskipun demikian, ketiga sultan di Cirebon tetap diperkenankan untuk menggunakan tanda-tanda kebesaran dan tata cara penghormatan yang selama ini berlaku di lingkungan kesultanan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga citra para sultan di mata rakyatnya (Chijs 1896, 482-483).

Merujuk kepada peraturan tanggal 13 Maret 1809, Sultan Sepuh ditugaskan untuk mengelola wilayah *Tagala* (Tegal), *Gabang* (Gebang), *Koeningan* (Kuningan), *Tjikasso* (Cikaso), *Loessarrie* (Losari), dan sebagian pusat wilayah Cirebon (*Cheribon hoofd-negorij*). Ia menguasai tanah pertanian seluas total 4.239 *jung*¹³ dan penduduk sebanyak 80.739 jiwa. Sultan Anom menguasai wilayah *Pandjalo* (Panjalu), *Mattang Hadjie* (Matangaji), *Radja Galo* (Rajagaluh), *Siedang Kasie* (Sindangkasih), *Banawang Wettang* (sebagian), dan sebagian pusat wilayah Cirebon. Ia menguasai tanah pertanian seluas total 4.304 *jung* dan penduduk sebanyak 76.622.

¹¹ Peraturan tersebut terdiri atas: Ketentuan Umum (6 pasal); Bagian Pertama, Perihal Prefek (32 pasal); Bagian Kedua, Perihal Para Sultan, Bupati, dan Pemerintahan Daerah Lebih Lanjut (31 pasal); Bagian Ketiga, Perihal Pajak, Kerja Pengabdian, dan Kewajiban-kewajiban Lain Penduduk Pribumi (16 pasal); Bagian Keempat, Perihal Pengadilan Negeri (11 pasal); Bagian Kelima, Perihal polisi, Pembuatan Jalan, dan Layanan Pos (31 pasal) (Chijs 1896, 474-513).

¹² "De drie Sulthans der Cheribonsche landen zullen voortaan worden beschouwd en behandeld als ambtenaren van Zijne Majesteit den Koning van Holland en in rang onmiddelijk volgen op den prefect..."

¹³ 1 *jung* = 4 *bau* (Purwadi dan Purnomo 2008, 61; Wijayati 2001, xiv). Sementara 1 *bau* = 500 *tumbak* = 7.000 meter persegi. Jadi, 1 *jung* = 28.000 meter persegi.

Sementara Sultan Cirebon menguasai wilayah *Kandang Auwer* (Kandanghaur), *Banawang Koelon*, dan *Banawang Wettang* (sebagian). Ia menguasai tanah pertanian seluas 4.293 *jung* dan penduduk sebanyak 80.250 jiwa (Chijs 1896, 568-569)¹⁴. Selain itu, Daendels mewajibkan kepada para sultan untuk --secara bersama--menyediakan kontingen (upeti) berupa beras sebanyak 2.000 *koyan*¹⁵ dan kognisi (pengakuan utang) sebesar 30.000 ringgit tiap-tiap tahun (Atja 1988, 43).

c) Laporan Raden Dipati Natadireja

Merujuk kolofon, Raden Dipati Natadireja menulis surat pada 25 Juli 1808. Dengan demikian, saat itu, Daendels baru enam bulan melaksanakan tugas sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda. Hingga kini, penulis belum berhasil mengidentifikasi sosok Raden Dipati Natadireja. Di dalam surat, ia hanya mengungkapkan bahwa dirinya adalah “...*abdi dhalem Radhèn Dipati Natadireja ing Nagari Garagè*”.

Setelah puji-pujian, Raden Dipati Natadireja menyinggung tentang perintah Daendels -- yang disampaikan melalui Petor¹⁶ Cirebon—kepada dirinya untuk memeriksa para pejabat rendah (*abdi dhalem alit*) di Cirebon karena ada indikasi bahwa banyak pejabat rendah di Cirebon terlibat dalam pemberontakan. Selanjutnya, melalui surat itu, ia melaporkan bahwa pemeriksaan itu sudah rampung. Raden Dipati Natadireja telah memeriksa para pejabat rendah (*abdi dhalem para kapala, tuwin titiyang alit*). Menurut dia, berdasarkan pengamatan dan pendengaran, para pejabat rendah itu merasa senang, tanpa beban. Mereka juga bergembira hati dalam melakukan semua pekerjaan. Ia menulis, “Atas dasar itu, saya sama sekali tidak merasakan adanya indikasi bahwa para *abdi dalem alit* telah berperilaku tidak pantas tersebut (*mila dhadhos ing mangkè wonten ingkang katingalan tuwin ingkang kawula pirem mēnggah ingkang dhadhos sawab dharunanipun ing bot kapratanipun kēdhik-kēdhik, inggih ugi sami suka girang, saha kajēng majēng ing padhamēlan*)”.

Meskipun demikian, sebenarnya, Raden Dipati Natadireja menyimpan kekhawatiran bahwa para *abdi dhalem alit* memang telah berani berbuat “sesuatu yang tidak pantas”. Jika benar, itu merupakan kebodohan mereka karena termakan bujuk rayu sehingga mau mengikuti langkah “*kapala titiga*”, yakni Kulur, Rangin, dan Draham. Ia mengungkapkan, selagi “*kapala titiga*” itu belum tertangkap, mereka akan terus memengaruhi para *abdi dhalem alit* (yang belum bergabung).

Selain itu, Raden Dipati Natadireja juga mengungkapkan bahwa Petor Cirebon sempat menyinggung seorang *abdi dalem* bernama Demang Suraprasandhah. Sebelumnya, Daendels meminta agar sang demang dihukum.

Menurut Raden Dipati, hukuman terhadap Demang Suraprasandhah sudah dijatuhkan. Apalagi, yang bersangkutan memang tak hanya sekali dua memperlihatkan sikap membangkang dan tak mengindahkan perintah. Malah, Rangin, salah seorang dari “*kapala titiga*”, pernah bersembunyi di sebuah dusun yang berada di bawah kekuasaan Demang Suraprasandhah. Ia menulis, “Jelas sekali, tidak ada usaha sang demang untuk menangkap Rangin. Sebaliknya, ia malah menyuruh Rangin melarikan diri (...*yèn angatingalena ing katēmenanipun amuri anyēpēng wau pun Rangin, tansah ugi katingalan ēnggēnipun angubēng-ubēng ambrih ing bubaripun wau pun Rangin kimawon*)”.

Seperti dikemukakan di atas, pada tahun-tahun pertama abad ke-19, kegawatan di Cirebon meningkat. Laskar bersenjata dari kalangan rakyat hadir di mana-mana sehingga menciptakan situasi tidak aman di seantero wilayah itu. Stevens (1978, 79) mencatat, terdapat setidaknya tujuh

¹⁴ Berdasarkan ketentuan pada tanggal 7 April 1809, ketiga sultan harus menyerahkan sebagian tanah sebagai jatah untuk para pejabat di bawahnya, seperti bupati “luar”, bupati “dalam”, tumenggung distrik, pangeran, kliwong, pejabat pengadilan negeri, demang besar, ketip, jaksa, mantri, moedin, prenta atau petingi, kepala lurah, sipir, dan opas (Chijs 1896, 654-655).

¹⁵ 1 *koyan* (*kojang*) = 1.853 kilogram (Wijayati 2001, xiv).

¹⁶ *Pétor D KN 1. Priyayi pangrèh praja bangsa Wlanda; 2. Asistén residhèn* (Tim Balai Bahasa Yogyakarta 2011, 539).

elemen yang, secara langsung ataupun tidak, menyebabkan wilayah Cirebon mengalami *complex conflict*. Pertama, perjuangan untuk mengembalikan (restorasi) kekuasaan para sultan di Cirebon yang telah dipangkas secara gradual bahkan pada akhirnya hilang sama sekali. Kedua, rivalitas antara Raja Kanoman, putra mahkota yang kehilangan pulung keraton pada 1797, dengan dua sultan yang tengah menjabat (Sultan Sepuh VII dan Sultan Anom V). Ketiga, perlawanan terhadap orang-orang Cina. Dalam kapasitas sebagai penyewa lahan kepada pangeran dan ketua adat, orang-orang Cina dipandang oleh kaum petani sebagai pengeksploitasi. Keempat, permintaan kompeni – dan juga penjajah berikutnya- terhadap hasil-hasil produksi lokal. Kelima, pemerasan yang dilakukan oleh para pejabat kolonial dan perilaku mereka yang secara nyata bertentangan dengan rakyat setempat. Keenam, pengenalan sistem pajak tanah oleh Raffles dan pemberlakuannya. Ketujuh, peningkatan jumlah lahan yang dimiliki oleh pihak swasta Barat. Apalagi, para pemilik lahan itu mendapat jatah lahan yang sangat luas. Mereka juga memiliki hak untuk terus memperluas lahan.

Iken (1896, 121) menulis:

Hata, maka di negari Tjirebon ada djoega haroe-biroe, karena orang banjak dianiajukan oleh Sultan Sepoeh, jang telah mendjoewal padjak kapada orang Tjina; dan lagi orang Tjina terlaloe menoekoel dan menindis orang. Maka haroe-biroe iloe ditanggoengkan oleh Sultan Sepoeh atas radja Kanoman, sebab itoe radja Kanoman diboewang ka Ambon, tetapi satelah didengar itoe oleh orang banjak, maka haroe-biroe bertambah2 dan orang banjak pergi ka Betawi menghadap Toewan-Besar minta, soepaja radja Kanoman terlepas. Maka Toewan-Besar meloeloeskan perminlaan itoe; maka radja Kanoman dipanggil poelang, dan dikembalikan pada pangkatnja, tetapi baroe-biroe itoe tiada dipadamkan. Sebab itoe, maka Toewan-Besar memoetoeskan perkara itoe sendiri, maka koewasa Sultan dikoeoengi dan Gouvernement memborongkan segala beja dan tjoekai; maka Sultan dapat belandja mali tiap- tahoen, dan lagi tanah Tjirebon diketijlkan. Maka djadjahan Soekapoera dan Limbangan dikepilkan dengan tanah Priangan, dan Galoeh dikepilkan dengan karadjaan Djoegja, ditoekar dengan djadjahan lajin.

Marihandono (2015, 9) mencatat, mula-mula, perjuangan rakyat dipimpin oleh Bagus Sidong dan dua putranya, Bagus Arisim dan Bagus Suwasa. Akan tetapi, pada Agustus 1806 mereka menyerahkan diri. Meskipun demikian, masih banyak tokoh yang memutuskan untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Beberapa di antara mereka adalah Demang Kuningan, Warga Kutipa, Demang Losari, Sangbaya, Para mantri Gargo Minggolo, Wiriosroyo, Jurang Prawiro, Joyosemito, Ngabehi Lanlang, Raden Jareng, Bagus Kelor, Bagus Santin, Macan Putih, Bagus Manuk, dan Bagus Rangin. Belakangan, enam di antara tokoh itu bersedia berunding, bahkan meminta pengampunan. Namun, Bagus Rangin telah berangkat mengungsi ke tempat lain, bahkan bersembunyi di Gunung Haji, dan dengan kedok untuk melindungi penduduk, telah melakukan perampokan¹⁷.

Di dalam surat, disebutkan bahwa pada 1808 itu, perjuangan rakyat dipimpin oleh tiga serangkai yang disebut *kapala titiga*, yakni Kulur, Rangin, dan Draham. Hal itu berbeda dengan catatan Belanda. Paulus (1917, 476), misalnya, mencatat bahwa ketiga tokoh itu memegang tampuk pimpinan pada tahun berbeda. (Kiai) Kulur (kerap juga disebut sebagai Kiai Luhur) dan Draham (Drahman) memimpin perjuangan rakyat pada 1808. Sementara (Bagus) Rangin (kerap juga disebut sebagai Bagus Rangga) baru memimpin perjuangan rakyat pada tahun 1811-1812. Pada tahun 1816, tampuk kepemimpinan dipegang oleh Bagus Sanda. Sementara pada 1818,

¹⁷ *As for the resistance of the population in these years Bagus Rangin operated. Daendels gave him the name of "rover-hoofd" or robber-chief, who disturbed Cirebon in 1811, but he did not give details on his raids or "roofstochten", save that Resident Domis promised a prize of one thousand Spaanse matten for his detention. Dutch historians saw him as a fanatic or as a feared and venerated leader (Stevens 1978, 84).*

tongkat perjuangan diestafetkan kepada Bagus Serit dan Nairem (biasa juga disebut Nairim atau Nariyem)¹⁸.

Dalam konteks pemimpin perjuangan rakyat pada 1808, penulis belum menemukan informasi detail ihwal Kulur (Kiai Luhur) dan Draham. Namun, soal Bagus Rangin, Stevens (1978, 84) menyebutkan bahwa ia merupakan pemimpin gerilya yang sukses dan mampu mengorganisasikan pasukan dengan baik. Selain itu, ia tak hanya berjuang melawan para pengusaha Cina yang menindas, tetapi juga melawan Belanda. Ia memiliki pasukan yang terdiri atas 250-300 tentara. Akan tetapi, belakangan, jumlah itu terus bertambah banyak, terutama setelah Jawa jatuh ke tangan Inggris, September 1811. Tentara Jawa (yang direkrut pada masa Daendels) diberhentikan oleh Raffles lalu mereka bergabung dengan pasukan rakyat menentang penjajah.

Raffles (1814, 128) menyebutkan bahwa sebenarnya Bagus Rangin juga memiliki latar belakang pribadi dalam perjuangannya. Suatu ketika, di awal abad ke-19 itu, ia pulang kampung setelah sekian lama merantau. Betapa kagetnya dia ketika menyaksikan bahwa sawah yang ia tinggalkan telah disewakan kepada orang Cina. Bagus Rangin mencoba untuk mengajukan pemulihan hak (restitusi), tetapi sia-sia belaka. Di lain pihak, untuk mengamankan kontrak, (selain uang sewa) orang Cina itu berani membayar uang tambahan sebesar 100 *ducatoons*. Hal inilah yang membuat Bagus Rangin naik pitam lalu berniat membunuh orang Cina tersebut. Mengingat konsekuensi yang harus diterima jika menempuh langkah itu, Bagus Rangin mengurungkan niat. Ia pun kemudian menghimpun teman-teman yang senasib dengannya, lalu bergabung dengan orang-orang yang lahan mereka juga jatuh ke tangan Cina.

Wajar jika kemudian banyak sekali rakyat, juga pejabat rendahan –terutama tingkat kampung, desa, dan kecamatan-- yang mendukung perlawanan. Menurut Stevens (1978, 84), Bagus Rangin memusatkan pergerakan di Bantarjati, berlokasi di perbukitan di dekat Cirebon. Ia didukung oleh banyak sekali kepala kampung, baik berupa tenaga maupun harta benda. Bahkan, Rangin memiliki enam panglima --yang sekaligus menjabat sebagai kepala kampung-- dan menjadikan rumah mereka sebagai tempat persembunyian. Di rumah tersebut juga dibentuk sebuah dewan, di mana seorang penulis merupakan bagian di dalamnya. Penulis menduga, Demang Suraprasandhah yang disinggung di dalam surat Raden Dipati Natadireja merupakan satu dari enam kepala kampung tersebut. Hal itu merujuk pada informasi yang disampaikan oleh Raden Dipati Natadireja bahwa Demang Suraprasandhah tak hanya sekali menunjukkan sikap membangkang dan tidak mengindahkan perintah. Selain itu, alih-alih menangkap Bagus Rangin yang tengah bersembunyi di wilayah kekuasaannya, Demang Suraprasandhah malah memberi jalan kepada salah satu dari *kapala titiga* itu untuk segera melarikan diri.

Para pemimpin lokal memutuskan bergabung dengan Bagus Rangin, terutama bupati Indramayu, sejak ia merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Belanda. Ia juga memasok informasi tentang pergerakan pasukan penjajah. Dengan cara itu, Bagus Rangin dan kelompoknya mampu secara efektif melakukan penyergapan dan pada akhirnya memperoleh banyak sekali senjata. Selain itu, persenjataan juga diperoleh dari Pringa Wedana, putra salah seorang pemimpin lokal, yang mencuri dari gudang penjajah (Stevens 1978, 84).

Dalam catatan Lubis (2015, 4-5), para pemimpin lokal yang bergabung dengan Bagus Rangin berasal dari berbagai daerah. Mereka adalah Bagus Wariem dan Bagus Ujar dari Bayawak, Bagus Sakti dan Bagus Kondur dari Jatitujuh, Rontui dari Sindanghaji (Rajagaluh), Nairem dan Samun dari Baruang Kulon, Bana (sekretaris Bagus Rangin) dari Baruang Wetan, Bagus Sidung dari Sumber, Bagus Arisem dari Loyang, Bagus Suara dari Bantarjati, Bagus Sanda dari Pamayahan, Bagus Narim dari Lelea, Bagus Jamani dari Depok, Demang Penangan dari

¹⁸ *De leverantiën werden beperkt tot die der koffie en der kapas. Maar daar de som der lasten niet verminderde, bleef, hoewel geleidelijk afnemende, het verzet voortduren onder de volkshoofden Kjai Koeloer (of Loehoer) en Drahaman (1808), later in 1811 en '12 onder bagoes Rangga of Rangin, in 1816 onder bagoes Sanda, in 1818 onder bagoes Serit en een dorpshef, Nairim genaamd.*

Kandanghaur, Demang Wargagupita dari Kuningan, Wargamanggala dan Harmanis dari Cikao, Wirasraya dari Manis, Jurangprawira dari Linggajati, Jayasasmita dari Ciminding, Jangbaya dari Luragung, Anggasraya dari Timbang, Demang Jayaprawata dari Nagarawangi, Demang Anglonklagon dari Weru, Ingabei Martamanggala dari Pagebangan, dan Demang Jayapratala dari Sukasari.

5. KESIMPULAN

Dilihat dari isi, surat yang ditulis oleh Raden Dipati Natadireja merupakan laporan hasil pemeriksaan terhadap para pejabat rendahan (*abdi dalem alit*) di seantero Cirebon. Ia melaporkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, semua pejabat rendahan di Cirebon mengaku senang bekerja dengan Belanda. Oleh karena itu, Raden Dipati Natadireja menyatakan bahwa tak mungkin para pejabat rendahan itu mau bergabung dengan kalangan “pemberontak”. Meskipun demikian, ia mengaku khawatir, para pejabat rendahan itu bakal termakan bujuk rayu pemimpin perjuangan rakyat yang ia sebut sebagai *kapala titiga*, yakni Kulur, Rangin, dan Draham. Apalagi, pada saat surat ditulis, mereka tengah gencar mengambil hati rakyat. Di samping itu, Raden Dipati Natadireja juga melaporkan bahwa ia telah menghukum Demang Suraprasandhah, salah seorang pejabat lokal yang diduga kuat mendukung perjuangan Bagus Rangin dan kawan-kawan. Hukuman itu dijatuhkan lantaran Demang Suraprasandhah telah berulang kali menunjukkan sikap membangkang terhadap perintah pejabat kolonial.

Merujuk kepada sumber-sumber sejarah, Demang Suraprasandhah merupakan salah satu pejabat lokal yang menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat. Selain itu, diperoleh juga keterangan bahwa Kulur, Rangin, dan Draham merupakan tiga dari sekian banyak pemimpin perjuangan rakyat yang --secara masif-- telah berlangsung sejak tahun 1806 dan baru berakhir pada tahun 1818. Setidaknya terdapat tujuh elemen yang, secara langsung ataupun tidak langsung, menyebabkan wilayah Cirebon bergolak. Pertama, perjuangan untuk mengembalikan (restorasi) kekuasaan para sultan di Cirebon yang telah dipangkas secara gradual bahkan pada akhirnya hilang sama sekali. Kedua, rivalitas antara Raja Kanoman, putra mahkota yang kehilangan pulung keraton pada 1797, dengan dua sultan yang tengah menjabat (Sultan Sepuh VII dan Sultan Anom V). Ketiga, perlawanan terhadap orang-orang Cina. Dalam kapasitas sebagai penyewa lahan kepada pangeran dan ketua adat, orang-orang Cina tersebut dipandang sebagai pengeksploitasi oleh kaum petani. Keempat, permintaan kompeni –dan juga penjajah berikutnya-- terhadap hasil-hasil produksi lokal. Kelima, pemerasan yang dilakukan oleh para pejabat kolonial dan perilaku mereka yang secara nyata bertentangan dengan rakyat setempat. Keenam, pengenalan sistem pajak tanah oleh Raffles dan pemberlakuannya. Ketujuh, peningkatan jumlah lahan yang dimiliki oleh pihak swasta berkebangsaan Barat. Apalagi, para pemilik lahan itu mendapat jatah lahan yang sangat luas. Mereka juga memiliki hak untuk terus memperluas lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atja. 1988. “Menjelang Penetapan Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Cirebon.”
- Baried, Siti Baroroh, Siti Chamamah Soeratno, Sawoe, Sulastin Sutrisno, dan Moh Syakir. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Boulger, Demetrius Charles. 1897. *The Life of Sir Stamford Raffles*. London: Horace Marshall & Son.
- Breman, Jan. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Carey, Peter. 2013. “Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811: Hubungan Politik, Seragam, dan Jalan Raya Pos.” Dalam *Kuliah khusus tentang Daendels (Daendelslezing) untuk Yayasan Daendels (Stichting Daendels) di Felix Meritis Keizersgracht, Amsterdam*. Amsterdam.

- . 2015. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*. Depok: Komunitas Bambu.
- Chijs, J. A. van der. 1896. *Plakaatboek, 1602-1811. Vijftiende Deel (1808-1809)*. Batavia's Hage: Landsdrukkerij/M. Nijhoff.
- Gallop, Annabel Teh. 1994. *The Legacy of The Malay Letter (Warisan Warkah Melayu)*. London: British Library.
- Hall, D. G. E. 1988. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Iken, D. 1896. *Hikajat Kompeni Orang Wolanda di Hindia Timoer Ini*. Amsterdam: Njonja Djanda J. Tak dengan Anaknya.
- Lombard, Denys. 2008a. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian 1: Batas-batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama/ Ecole francaise d'Extreme-Orient.
- . 2008b. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian 2: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama/ Ecole francaise d'Extreme-Orient.
- Lubis, Nina H. 2015. "Perjuangan Bagus Rangin dan Pelanjutnya." Makalah *Seminar Nasional Pengusulan Ki Bagus Rangin Sebagai Pahlawan Nasional*. Majalengka.
- Marihandono, Joko. 2015. "Bagus Rangin Berdasarkan Arsip-arsip Kolonial." Makalah *Seminar Nasional Pengusulan Ki Bagus Rangin Sebagai Pahlawan Nasional*. Majalengka.
- Paulus, J. 1917. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. Jilid 1*. Gravenhage/Leiden: Martinus Nijhoff/E.J. Brill.
- Purwadi, dan Eko Priyo Purnomo. 2008. *Kamus Sansekerta-Indonesia*. Yogyakarta: BudayaJawa.com.
- Raffles, Thomas Stamford. 1814. *Substance of a Minute Recorded by The Honourable Thomas Stamford Raffles, Lieutenant-Governor of Java and its Dependencies, on the 11th February 1814; on the Introduction of an Improved System of Internal Management and the Establishment of a Land Rental*. London: Black, Parry, and Co.
- . 2014. *The History of Java*. Yogyakarta: Narasi.
- Stevens, Th. 1978. "Cirebon at the Beginning of the Nineteenth Century: an Analysis of Reactions from a Javanese Sultanate to the Economic and Political Penetration of the Colonial Regime Between 1797 and 1816." Dalam *Papers of the Dutch-Indonesian Historical Conference, held at Noordwijkerhout, the Netherlands*. Leiden/Jakarta: the Bureau of Indonesian Studies under the Auspices of the Dutch and Indonesian Steering Committees of the Indonesian Studies Program.
- Stibbe, D.G., dan C. Spat. 1927. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie. Vijfde Deel*. 'S Gravenhage/Leiden: Martinus Nijhoff/E.J. Brill.
- Stockdale, John Joseph. 2014. *Sejarah Tanah Jawa*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Sunardjo, R. H. Unang. 1983. *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479-1809*. Bandung: Tarsito.
- Tim Balai Bahasa Yogyakarta. 2011. *Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wijayati, Putri Agus. 2001. *Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*. Yogyakarta: Tarawang Press.

